

Strategi Peningkatan Sektor UMKM dalam *Mengakselerasi* Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada *Digitalisasi* dalam *Mengakselerasi* Pengembangan UMKM

Ferry Setiawan

Abstrak

Ketahanan UMKM yang tinggi selama ini sebagai bantalan perekonomian karena kemampuannya untuk bertahan pada periode tekanan dan dapat tumbuh kembali lebih cepat dan tinggi pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak ekonomi baru dan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan latarbelakang tersebut penulis ingin menceritakan bagaimana Strategi Peningkatan Sektor UMKM dalam *Mengakselerasi* Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada *Digitalisasi* dalam *digital* Pengembangan UMKM. Hasil dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Pandemi ini menimbulkan sisi buruk bagi pelaku UMKM khususnya di Kalimantan Tengah dimana dapat dilihat dari banyaknya pelaku UMKM yang dipaksa gulung tikar karena rendahnya daya beli masyarakat di Kalimantan Tengah serta larangan untuk tidak berkumpul dan pembatasan sosial yang berdampak pada Interaksi sosial secara nyata dan minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait pemanfaatan industri 4.0 baik berupa cara penggunaan *Digital Marketing* maupun interaksi didunia *digital*, *kedua*, Pemerintah Kalimantan Tengah belum siap dalam membuat suatu kebijakan dan masih dianggap minim kajian analisis Kebijakan Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan Tengah yang langsung berdampak pada perputaran ekonomi, *ketiga*, Keterlibatan dan sinergi atas unsur- unsur dalam pemerintahan yang dapat dikelompokan menjadi 3 kategori yaitu Pemerintah, Swasta, dan masyarakatlah yang dapat *Mengakselerasi* Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada *Digitalisasi* dan yang terakhir adalah Rendahnya pemahaman para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah dalam membuat laporan keuangan.

Kata Kunci : UMKM, Strategi, Digitalisasi

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian domestik, tercermin pada jumlah unit usaha yang banyak, penyerapan tenaga yang tinggi, dan kontribusi yang besar terhadap *PDB*. UMKM juga memiliki ketahanan yang tinggi dalam menghadapi berbagai krisis sebelumnya, meskipun krisis Covid-19 saat ini memberikan tekanan yang luar biasa besar. Ketahanan UMKM yang

tinggi tersebut selama ini sebagai bantalan perekonomian karena kemampuannya untuk bertahan pada periode tekanan dan dapat tumbuh kembali lebih cepat dan tinggi pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak ekonomi baru dan pemulihan ekonomi nasional.

Di Sisi Iain, ekonomi dan keuangan *digital* yang pesat telah menumbuhkan berbagai *platform digital* yang menawarkan inovasi dalam kegiatan produksi, konsumsi, kolaborasi. dan berbagi. *Digitalisasi* tersebut memberikan peluang kepada UMKM untuk beradaptasi dan *bertransformasi* untuk bisa bertahan dan bangkit serta tumbuh tinggi. disertai dengan peningkatan *korporatisasi*, kapasitas, dan pembiayaan. Salah satu pelajaran penting dalam pandemi Covid-19 adalah terjadinya *akselerasi* penggunaan *digital* dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, kegiatan produksi, maupun transaksi investasi. Dengan demikian, pemanfaatan *platform digital* dapat mendorong UMKM yang lebih kuat melalui peningkatan kapasitas yang lebih produktif dan inovatif serta memfasilitasi perluasan akses UMKM baik pada *marketplace*, industri, dan lembaga keuangan.

Sementara itu, sektor pariwisata juga memerlukan perhatian khusus. Sejak awal tahun 2020 kinerja pariwisata diuji dengan adanya berbagai kebijakan pembatasan sosial yang menyebabkan mobilitas masyarakat mengalami penurunan secara signifikan. Hal tersebut mengakibatkan penurunan kunjungan Wisatawan sehingga otomatis memukul kinerja sektor pariwisata secara keseluruhan, termasuk fasilitas pendukungnya seperti penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, jasa transportasi dan perjalanan wisata, serta kawasan wisata. Namun demikian, potensi *rebound* sektor pariwisata diperkirakan terjadi paling cepat sejalan dengan kasus Covid-19 yang semakin mereda

serta telah dimulainya program vaksinasi kepada masyarakat.

Diperlukan sinergi antara Kementerian lembaga, Pemerintah Daerah. *Fintech Marketplace* dan Seluruh Pelaku usaha untuk dapat menyiapkan UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan pasar di masa pandemi Selain itu. inovasi dalam sektor pariwisata seperti *revitalisasi* destinasi. pemulihan permintaan domestik, dan kegiatan promosi untuk menggerakkan ekonomi wilayah Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi 1,40 % (yoy).

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis menacaritahu dan memperkuat rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memberikan inovasi dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat upaya otoritas dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan kajian Strategi Peningkatan Sektor UMKM dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada *Digitalisasi* dalam Mengakselerasi Pengembangan UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Dampak Pandemi COVID-19

Menurut Arifki (2021) dampak pandemi COVID-19 kepada UMKM dapat dilihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari penawaran, pandemi Covid-19 menyebabkan banyak UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja; karena alasan menjaga kesehatan pekerja dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing*). Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi

pelaku UMKM di Indonesia untuk terus mampu bertahan dalam membantu pemulihan perekonomian baik dalam skala mikro maupun makro. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah sektor perekonomian mikro yang bersentuhan langsung pada praktik perekonomian masyarakat, utamanya masyarakat dalam skala perekonomian menengah ke bawah (Arifki, 2021).

Adanya pandemi Covid-19 ini menyadarkan masyarakat bahwa UMKM adalah salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak melibatkan sektor industri atau kerja sama dengan luar negeri. Tidak salah jika kemudian UMKM menjadi salah satu harapan besar dalam pemulihan sistem perekonomian masyarakat, atau bahkan sistem perekonomian di Indonesia. Kegiatan UMKM pada kondisi pandemi Covid-19 ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Adapun tantangan yang dimaksud yaitu, perlu adanya solusi jangka pendek untuk membantu para stakeholder atau pelaku UMKM agar tetap berjalan maksimal dengan berbagai keterbatasan kebijakan pemerintah. Sedangkan peluangnya dapat diartikan sebagai sebuah proyek pemerintah untuk merancang aktivitas perekonomian UMKM secara mudah. Kemudahan tersebut tentu selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Indonesia sudah memasuki era industri 4.0 yang secara tidak langsung menuntut segala bentuk aktivitas perekonomian masyarakat

berbasis pada teknologi atau dikenal dengan istilahnya *digitalisasi* UMKM.

Kebijakan yang Spontan pada COVID-19

Dalam kajian Murhaini Et all (2021) sebagai salah satu objek utama pandemi untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi keadaan darurat. bahwa berbagai langkah kebijakan penanggulangan Covid-19 sulit dilaksanakan karena perilaku kontroversi interaksi sosial yang dipicu oleh ketidakjelasan jaminan sosial dan keselamatan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Perilaku ini muncul karena pemerintah tidak menerapkan undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan) yang menjamin kelangsungan hidup warga negara jika terjadi keadaan darurat kesehatan tetapi membuat peraturan baru tentang pembatasan sosial berskala besar yang harus ditangani. dengan pandemic (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19)). Penghindaran penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan secara implisit menunjukkan masih rendahnya kemampuan Pemerintah Indonesia dalam menjamin keamanan sosial dan ekonomi warga negara Indonesia (Murhaini, 2021).

Pelaku Pembangunan dalam Paradigma *Good Government Governance*

Pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menjadi kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma - norma tertentu.

Menuju *modernitas* secara bertahap dengan mendayagunakan potensi baik alam, manusia, maupun sosial dan budaya (Setiawan dan Saefulloh, 2019).

Salah satu yang melaksanakan pembangunan adalah daerah. Otonomi daerah memerlukan peningkatan kualitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang baik atau dikenal dengan istilah *good government governance*. Hal tersebut dapat diartikan sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat (Mardiasmo, 2009). *Government governance* lebih menekankan kepada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan keuangan negara. *Good Government Governance* diterapkan untuk tetap menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan pemerintah dan masyarakat, tantangan yang muncul adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak membebankan semua biaya kepada masyarakat luas.

Suatu pemerintah yang baik adalah jika pemerintah tersebut produktif dan selalu memperhatikan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat yang meningkat baik dalam aspek produktivitas, kesejahteraan *spiritual* dengan indikator rasa aman, bahagia, tenang serta adanya rasa kebangsaan yang baik (Suryo, 2007). Era reformasi yang ditandai dengan otonomi daerah telah merubah birokrasi pemerintah dengan fokus kepada masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pola interaksi yang lebih bersifat konsultatif dengan mengedepankan keseimbangan antar aktor yaitu negara, swasta dan masyarakat sehingga tercipta pengelolaan pemerintahan yang baik

(*good government governance*) (Ahmar dan Kurniawan, 2007).

Menurut Kusmayadi (2005), Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi atas unsur-unsur dalam pemerintahan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Negara/Pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor Swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar.
3. Masyarakat Madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan Keuangan adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka yang lain yang mempunyai makna/ menjelaskan arah perubahan (*trend*) suatu fenomena. Angka – angka dalam laporan keuangan akan sedikit artinya kalau dilihat secara sendiri – sendiri. Dengan analisis pemakaian laporan keuangan akan lebih mudah menginterpretasikannya. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi –

transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Rendahnya pemahaman dalam hak penggunaan dan pelaporan keuangan membuat para pelaku UMKM dapat gulung tikar karena ketidak piawai mereka dalam mengaplikasikannya khususnya para pelaku UMKM yang berada di Kalimantan Tengah. Maka dengan katalain aktivitas apapun dalam kegiatan UMKM semua akan mengkrucut kepada laporan keuangan. Dan dapat disimpulkan juga bahwa laporan keuangan akan berperan pada sektor keuangan baik kepada pihak perbankan maupun pertanggungjawaban kepada pemilik modal dalam membuat suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku pelaku usaha UMKM.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang

mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh (Afrizal,2015:102).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau bahan pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menggambarkan Strategi Peningkatan Sektor UMKM dalam *Mengakselerasi* Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada *Digitalisasi* dalam *Mengakselerasi* Pengembangan UMKM.

DISKUSI DAN KESIMPULAN

Hasil penelitian Hadion Wijoyo & Widiyanti (2020) menyebutkan bahwa UMKM yang tidak bisa *beradaptasi* dengan *globalisasi*, secara perlahan akan kehilangan daya saingnya. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa di masa pandemi dan berkembangnya teknologi mendorong para pelaku UMKM untuk mampu menyeimbangkan kegiatan UMKM dengan perkembangan teknologi sebagai upaya untuk pelestarian usaha tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah peran spiritualitas dalam bertransaksi. Dengan memperhatikan nilai-nilai spiritualitas ini juga mampu memberikan solusi untuk bangkit dari masa pandemi dengan terus mengembangkan UMKM. UMKM tidak akan pernah lepas dengan adanya transaksi. Islam mengatur dalam bertransaksi harus ada nilai-nilai yang dijunjung, di antara yang paling penting adalah nilai-nilai keadilan, kemitraan dan tranparansi (Wijoyo dan Widiyanti, 2020).

Maka dapat disimpulkan bahwa Pandemic ini menimbulkan sisi buruk bagi pelaku UMKM khususnya di Kalimantan Tengah dimana dapat

dilihat dari banyaknya pelaku UMKM yang dipaksa gulung tikar karena rendahnya daya beli masyarakat di Kalimantan Tengah serta larangan untuk tidak berkumpul dan pembatasan sosial yang berdampak pada Interaksi sosial secara nyata dan minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait pemanfaatan industri 4.0 baik berupa cara penggunaan *Digital Marketing* maupun interaksi didunia *digital* antarlain yaitu :

1. *Business Model* seperti tentang bagaimana dalam menjalankan sebuah bisnis, diperlukan adanya sebuah gambaran/model. Tujuan modul ini memberikan gambaran besar terkait bisnis mulai dari mitra, saluran penjualan, target pasar hingga SDM yang dimiliki.
2. Membuat Konten seperti strategi pemasaran dimana kita merencanakan, membuat, dan mendistribusikan informasi yang mampu membantu UMKM untuk menarik konsumen.
3. Membuat *Website* seperti kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan (*home page*) menggunakan sebuah browser menggunakan *URL website*.
4. *Google My Business & SEO* seperti cara pelaku usaha dengan mengoptimasi kerja mesin pencari dengan kata kunci sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkannya. Serta penggunaan *Google My Business* sebagai fitur gratis yang disediakan oleh *Google*, dapat memberikan manfaat bagi

pelaku usaha agar bisnis mudah ditemukan di mesin pencari.

5. *Social Media Marketing* seperti bagaimana pengelolaan media sosial yang baik, menarik, dan berkelanjutan, baik secara organik maupun berbayar. Serta praktik dalam pengelolaan dan pemasaran melalui media sosial.
6. *Power Merchant* seperti pemanfaatan *fitur eksklusif* yang diberikan oleh *Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak*, dll untuk membantu *seller* meningkatkan penjualan dan kepercayaan pelanggan.

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi atas unsur-unsur dalam pemerintahan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

4. Negara/Pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
5. Sektor Swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar.
6. Masyarakat Madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi.

Good government governance, *World Bank* mendefinisikan *good government governance* sebagai

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dengan kerangka politik (*politic framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Kusmayadi, 2005).

Prinsip-prinsip *Good Government Governance* sebagai Kunci utama memahami *good government governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good government governance*. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat prinsip-prinsip *good government governance*, sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas (*Accountability*)
Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

- 2) Transparansi (*Transparancy*)
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan
- 3) Demokrasi (*Democraton*)
Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.
- 4) Aturan hukum (*Rule Of Law*)
Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Pelaku Pembangunan dalam Paradigma *Good Government Governance* dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada *Digitalisasi* dalam *Mengakselerasi* Pengembangan UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Negara/Pemerintahan dalam *Mengakselerasi* Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada *Digitalisasi* dalam *Mengakselerasi* Pengembangan UMKM adalah dengan melakukan :
 - a. Membuat pelatihan bagi UMKM yang berdagang dengan metode *konvensional* kearah *Digital*.
 - b. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk semaksimal mungkin membeli produk UMKM lokal baik dengan *konvensional* maupun *Digital*.
 - c. Melatih para UMKM dalam *Personal Branding, Digital Marketing*, dan Mekanisme pembayaran *Digital*.
 - d. Dapat membuat *E-Commerce* sendiri pada ruang lingkup Kalimantan Tengah agar para pelaku UMKM dapat bertemu langsung dengan pembeli.
 - e. Memberikan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat bagi UMKM dari hulu sampai hilir tidak hanya sebatas setelah pelatihan sudah habis, tetapi hingga para UMKM dapat mandiri.
2. Sektor Swasta sebagai pelaku perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar untuk *Mengakselerasi* Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada *Digitalisasi* dalam *Mengakselerasi* Pengembangan UMKM adalah dengan melakukan :
 - a. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah dalam mengupgrade metode *konvensional* kearah *Digital*.
 - b. Mendukung dalam hal Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk semaksimal mungkin membeli produk UMKM lokal baik dengan *konvensional* maupun *Digital*.
 - c. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah dalam *Personal Branding, Digital Marketing*, dan Mekanisme pembayaran *Digital*.
 - d. Mengikuti pelatihan serta mendaftarkan usahanya yang diadakan oleh Pemerintah dalam *E-Commerce* sendiri pada ruang lingkup Kalimantan Tengah agar para pelaku UMKM dapat bertemu langsung dengan pembeli.
 - e. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat bagi UMKM dari hulu sampai hilir tidak hanya sebatas setelah pelatihan sudah habis, tetapi hingga pelaku UMKM dapat mandiri.
3. Masyarakat Madani sebagai kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang berada di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi dalam interaksi dalam sistem pasar untuk

Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada *Digitalisasi* dalam *Mengakselerasi* Pengembangan UMKM adalah dengan melakukan :

- a. Menggunakan dan membeli produk UMKM lokal untuk menjaga agar pelaku UMKM lokal dapat berkelanjutan dan terhindar dari kebangkrutan.
- b. Mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam *Mengakselerasi* Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada *Digitalisasi*

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandemic ini menimbulkan sisi buruk bagi pelaku UMKM khususnya di Kalimantan Tengah dimana dapat dilihat dari banyaknya pelaku UMKM yang dipaksa gulung tikar karena rendahnya daya beli masyarakat di Kalimantan Tengah serta larangan untuk tidak berkumpul dan pembatasan sosial yang berdampak pada Interaksi sosial secara nyata dan minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait pemanfaatan industri 4.0 baik berupa cara penggunaan *Digital Marketing*.
2. Pemerintah Kalimantan Tengah belum siap dalam membuat suatu kebijakan dan masih dianggap minim kajian analisis Kebijakan

Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan Tengah yang langsung berdampak pada perputaran ekonomi.

3. Keterlibatan dan sinergi atas unsur- unsur dalam pemerintahan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pemerintah, Swasta, dan masyarakatlah yang dapat *Mengakselerasi* Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada *Digitalisasi*.
4. Rendahnya pemahaman para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah dalam membuat laporan keuangan.

Referensi

- Arifki (2021). *Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariat Vol 3 No 2.
- Ahmar dan Kurniawan. (2007). *Analisis Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Pemenuhan Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public di Bursa Efek Jakarta*, Jurnal MAKSI. Vol 7 No 3.
- Kusmayadi. (2005). *Upaya Mewujudkan Good Government Governance Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Murhaini Et All (2021). *The Calculations Of Sociological Situation From Indonesia Spontaneous Law During The Coronavirus Pandemic*. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol 12 No 10.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta
- Pratolo, S. (2007). *Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen. serta Tinjauannya pada Jenis Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Setiawan, F., & Saefulloh, A. (2019). *Kolaborasi Yang Dilaksanakan Di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya*. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, Vol 10 No.2.
- Soemarso S.R.(2006). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat : Jakarta
- Wijoyo, H. & Widiyanti. (2020). *Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era Pandemi Covid-19*. Dalam: Prosiding Seminar Nasional Kahuripan.